

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Bergerak dalam bidang dakwah islam, dengan berdasar pada Anggaran Dasar Muhammadiyah dan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta Bab 1 Pasal 1, Muhammadiyah memiliki prinsip Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang bersumber pada Al-Qur`an dan As-Sunnah. Di Indonesia, Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tertua dan terbesar yang telah banyak memberikan kontribusi dalam memajukan kemaslahatan umat.

Dikenal sebagai gerakan Islam modernis atau reformis dan juga sebagai sebuah gerakan pemabaharuan (tajdid), Muhammadiyah telah menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi Islam yang berkemajuan, dinamis, cerdas dan kreatif dalam melihat tanda-tanda zaman. Tajdid sendiri menurut bahasa (etimologi) adalah “mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang seharusnya.” dan jika merujuk pada pengertian istilah (terminologi) tajdid berarti pembaharuan terhadap kehidupan keagamaan, baik dalam bentuk pemikiran ataupun gerakan, sebagai respon atau reaksi atas tantangan baik internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan sosial umat (Abdullah, 1995). Dapat diambil kesimpulan bahwa tajdid adalah upaya untuk

memperbaharui pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu terhadap ajaran dasar Islam, atas dasar bahwa ajaran tersebut sudah tidak relevan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Memahami Muhammadiyah bukanlah memahami organisasi dalam pengertian administratif yang bersifat teknis saja, namun kita harus memahami Muhammadiyah sebagai gerakan Islam atau gerakan keagamaan (religious movement) yang terkandung di dalamnya sistem keyakinan (belief system), pengetahuan (knowledge), organisasi (organization) dan praktik-praktik aktifitas (practices activity) yang mengarah pada tujuan (goal) yang dicita-citakan. Tampil sebagai gerakan pembaharu (tajdid), Muhammadiyah mendapatkan pengikut yang kebanyakan kaum muda dan kaum akademisi yang menginginkan perubahan dari kekolotan faham agama yang jumud atau mandeg. Percampuran faham agama dengan dogma Takhayul, Bid'ah dan Khurafat (TBC) yang melekat saat itu adalah pekerjaan besar yang dihadapi Muhammadiyah. Proses revitalisasi dengan jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menjadi alat yang ampuh untuk membangunkan kembali umat Islam dari tidur panjangnya. Selama 1 abad keberadaanya, Muhammadiyah telah banyak melakukan pembaharuan di negeri ini. Memberi sumbangsih berupa pemikiran dan bukti nyata, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw pada zamannya, KH. Ahmad Dahlan pada zamannya pula, dan terus berlanjut sampai sekarang. Muhammadiyah mampu menunjukkan bahwa organisasi ini mampu merentas zaman. Pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dirasakan dalam berbagai bidang seperti sosial, politik, budaya, pendidikan, serta masih banyak lagi. Muhammadiyah

memaknai pembaharuan sebagai suatu proses berkelanjutan yang tidak akan pernah berkesudahan untuk memperbaiki tatanan kehidupan beragama dan bernegara pada setiap zaman, sebagaimana yang menjadi cita-cita Muhammadiyah, yaitu untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenarnya. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan transformasi mental, transformasi gagasan, transformasi cara kehidupan dan bersikap, serta transformasi etiket dan etika dalam kehidupan sebuah bangsa. Muhammadiyah akan terus memberikan kontribusi dan sumbangsuhnya untuk menyelesaikan berbagai persoalan di negara ini, karena sesuai dengan misinya, Muhammadiyah terlahir untuk mencerahkan bangsa.

Menginjak umurnya yang ke 104 tahun, terdapat setidaknya tiga alasan mengapa Muhammadiyah masih dapat bertahan hingga saat ini. Kelima poin tersebut yaitu, pertama, Muhammadiyah memiliki kekuatan prinsip gerakan yaitu Islam berkemajuan mencerahkan keadaban bangsa, dimana prinsip gerakan tersebut masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam membangun keadaban bangsa yang lebih baik. Kedua, Muhammadiyah tumbuh besar dan bertahan hingga saat ini karena sumber daya manusianya (SDM), sumber daya insani yang cerdas, dan memiliki nalar dan daya kritis yang kuat. Ketiga, Muhammadiyah memiliki kekuatan dalam sistem organisasinya, yaitu Muhammadiyah tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mandiri, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai jenis amal usaha milik Muhammadiyah, di tangan sistem dan pengelolaan yang baik akan menciptakan organisasi yang baik pula.

Dalam muktamar ke-46 seabad Muhammadiyah, Muhammadiyah memantapkan diri terhadap isu-isu strategi nasional dan internasional. Muhammadiyah berkomitmen kuat untuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) dengan mengambil prakarsa, partisipasi, dan langkah-langkah yang proaktif dan strategis. Memasuki abad kedua, Muhammadiyah meneguhkan komitmen gerakannya untuk berperan lebih proaktif dalam melakukan pencerahan bagi kehidupan umat, bangsa, dan kemanusiaan universal yang sarat tantangan. Dalam usaha melaksanakan komitmennya, Muhammadiyah mempunyai pengaruh yang sangat kuat ke dalam maupun keluar bagi perumusan politik luar negeri Indonesia. Termasuk diantaranya adalah peran Ormas ini dalam menangani konflik luar negeri yang terjadi di beberapa negara di luar Indonesia. Konflik sosial-politik di Filipina Selatan menjadi bukti adanya peran serta yang sangat strategis bagi NGO/Ormas di Indonesia dalam hal ini Muhammadiyah dalam memediasi aktor-aktor penting yang berkonflik sehingga permasalahan yang terjadi bisa ditemukan titik solusinya.

Konflik yang terjadi di Filipina Selatan tepatnya Mindanao ini secara historis merupakan sebuah konflik yang terjadi berkepanjangan. Secara geografis, Mindanao terletak di bagian selatan kawasan Filipina dengan bentuknya sebagai sebuah kepulauan. Seiring berjalannya waktu, dimulai dari abad ke – 15, Islam masuk ke dalam Mindanao dan mulai mengubah peta demografi, budaya, sosial, dan tata nilai dalam masyarakat Mindanao. Islam pun menjadi sebuah identitas masyarakat lokal Mindanao. Sementara di sisi

lain, terdapat kebijakan kontra oleh pemerintah Filipina terhadap struktur budaya, hukum dan politik masyarakat muslim Mindanao.

Penyebab konflik ini dimulai jauh sebelum masa kolonialisme Spanyol di Filipina. Kemudian berlanjut kepada konflik pada masa penjajahan Amerika sebelum kemerdekaan Filipina. Isu-isu agama dalam konflik membuat isu semakin memanas. Tindakan pemerintah Filipina kontra terhadap Islam menyebabkan masyarakat muslim Mindanao menjadi masyarakat yang termarjinkan. Masyarakat muslim Mindanao merasakan kesenjangan sosial yang sangat mencolok ditandai dengan perbedaan keadaan ekonomi, kehidupan sosial, pendidikan, budaya dan perlakuan hak asasi manusia antara pemerintah Filipina (center) dan masyarakat Mindanao (periphery).

Konflik antara pemerintah Filipina dengan masyarakat Mindanao kemudian meningkat menjadi konflik bersenjata (armed conflict) yang telah menyebabkan lebih dari 120.000 orang terbunuh dan menghabiskan anggaran militer senilai lebih dari 73 miliar Peso per tahun (Surwandono, 2013). Situasi tersebut mengakibatkan keadaan negara Filipina mengalami gejolak keamanan nasional yang tidak stabil di wilayah Mindanao. Di lain sisi, penduduk Mindanao menginginkan pemisahan diri (separatism) dari pemerintah Filipina dan ingin mendirikan negara merdeka di Mindanao, wilayah selatan Filipina untuk mendapatkan hak mengatur tanah dan wilayah mereka sendiri.

Berbagai upaya perdamaian yang dilakukan dalam menangani konflik yang terjadi di Mindanao sering kali mengalami kegagalan. Proses perundingan perdamaian yang dilakukan mengalami penyimpangan-

peyimpangan dan hanya menjadi prosedur formal. Upaya perdamaian yang seharusnya mengikat secara keseluruhan tidak mampu diimplementasikan. Inilah yang menjadi tujuan besar Muhammadiyah dalam mencari solusi penyelesaian konflik dan menjaga stabilitas keamanan terhadap konflik yang terjadi. Beberapa pilihan untuk terus berkonflik atau memulai jalan perdamaian dan negosiasi sangat ditentukan oleh konstruksi dari aktor Internasional dan aktor nasional yang terlibat dalam konflik Mindanao. Sehingga salah satu pemecah persoalan yang dapat dilakukan adalah dengan cara adanya pihak ketiga yang berperan sebagai mediator konflik.

Berhubungan dengan wujud komitmen visi Muhammadiyah 2025 yang ingin memiliki peranan dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal atau dinamika kemanusiaan global, Muhammadiyah memutuskan menjadi mediator dalam proses perdamaian konflik Mindanao dengan memberi berbagai pilihan fasilitas, yang diharap dapat memberi dampak menyegarkan bagi perdamaian etnis Mindanao. Hal ini didukung dengan keputusan *International Contact Group* (ICG) menunjuk Muhammadiyah sebagai pihak yang membantu penyelesaian konflik antara *Moro International Liberal Front* (MILF) dengan pemerintah Filipina. Di sisi lain keaktifan Muhammadiyah dalam forum internasional pun berhasil mencuri perhatian pemerintah Thailand dan Filipina yang secara khusus meminta Muhammadiyah membantu proses perdamaian di Thailand Selatan dan pula di Mindanao.

Kontribusi Muhammadiyah diharap mampu membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Mindanao melalui peran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Salah satu tokoh yang berperan adalah ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015. Prof. Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA. Beliau merupakan tokoh Muhammadiyah yang dikenal luas pergaulan internasionalnya, antara lain seperti menjadi Chairman World Peace Forum (WPF), Presiden Asean Committee on Religion for Peace (ACRP), Honorary President World Conference on Religion for Peace (WCRP), dan jabatan lainnya di berbagai forum dunia. Hubungannya tidak sekadar seremonial, tetapi aktif mendialogkan berbagai pemikiran Islam dan perdamaian, dalam hal ini serta turut memprakarsai pemecahan konflik salah satunya konflik di Mindanao, Filipina Selatan. Tidak hanya itu, Muhammadiyah turut menurunkan dua duta Muhammadiyah sebagai representatif di *International Contact Group*. Kedua delegasi tersebut adalah Dr. Sudibyo Markus dan Dr. Surwandono yang ditunjuk untuk melakukan komunikasi tingkat elit MILF dengan sejumlah tim panel perdamaian yang mewakili Mindanao, serta melakukan komunikasi untuk mendiskusikan rumusan terbaik dalam penyusunan program perdamaian di Mindanao dengan panel perdamaian dari pemerintah Filipina dan kedutaan besar Filipina.

Sebagai pelengkap dan pendukung, Muhammadiyah turut mengirimkan tim *scoping mission*, yang terdiri dari Dr. Sudibyo Markus, Dr. Surwandono, Prof. Dr. Imam Robandi, Ahmad Ma'ruf, SE, M. Si., untuk

melakukan *assesment* di tingkat *gras-root* pada sejumlah lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga sosial, lembaga amal, yang berafiliasi dengan MILF. Tim inilah yang kemudian merancang strategi penyelesaian dengan menyusun program lima tahunan yang diharap dapat merubah pola organisasi MILF dari organisasi yang dikenal dengan penggunaan senjatanya, menjadi organisasi yang berdasar pada nilai sosial, agama, pendidikan, dan ekonomi sehingga cita-cita terciptanya perdamaian Mindanao akan lebih cepat tercapai (Surwandono, 2015).

Partisipasi Muhammadiyah melalui tim assesment dalam memperjuangkan perdamaian Mindanao melalui negosiasi diimplementasikan dengan serangkaian strategi yang telah disusun dalam program lima tahunan. Strategi ini adalah bentuk kontribusi Muhammadiyah dalam mewujudkan komitmen Muhammadiyah untuk menjadi bagian dari penyelesai masalah (*problem solver*) di kancah internasional dengan menghadapi berbagai tantangan yang ada. Di dalam penulisan ini penulis menganalisis bagaimana bentuk strategi perdamaian konflik Mindanao yang dilakukan oleh Muhammadiyah berdasar pada konsep mediasi dan *multi-track diplomacy*.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas dapat ditemukan bahwa pokok permasalahannya adalah “*Bagaimana strategi Muhammadiyah dalam proses perdamaian konflik Mindanao?*”

C. Kerangka Pemikiran

Di dalam suatu penelitian dibutuhkan konsep maupun teori untuk memulai suatu penelitian sebagai pijakan untuk menjawab pertanyaan dari fenomena yang ingin diteliti. Studi Hubungan Internasional itu sendiri memiliki banyak teori maupun konsep yang dapat mendukung penyelesaian masalah yang diteliti. Terdapat dua konsep yang digunakan oleh penulis dalam memuat analisa tentang bentuk strategi yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam perdamaian konflik Mindanao. Berikut kerangka pemikiran yang digunakan penulis:

1. Konsep Mediasi

Sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan konsep mediasi oleh Christopher W. Moore (1982) dalam bukunya "*The Mediation Process: Political Strategies for Resolving Conflict*" yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diajukan. Konsep mediasi Christopher W. Moore adalah sebagai berikut:

“Mediasi adalah intervensi dalam sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga, yang dapat diterima, tidak memihak, dan netral dimana pihak ketiga tidak memiliki kekuatan otoritatif untuk membuat keputusan dan membantu pihak yang bersengketa secara sukarela untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama terhadap isu-isu yang ada dalam konflik.” (Moore, 1982)

Dari definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mediasi adalah sebuah tindakan intervensi pihak luar untuk menyelesaikan konflik bersama. Mediasi bekerja untuk menciptakan proses perdamaian terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik melalui dialog politik yang konstruktif,

atau untuk mengubah proses dialog menjadi sebuah resolusi konflik dan pembuatan perdamaian.

Secara esensial mediasi adalah interaksi dari kelanjutan negosiasi yang awalnya hanya dilakukan oleh pihak yang berkonflik atau bersengketa namun dalam perjalanan negosiasi terdapat intervensi dari pihak ketiga untuk membantu jalannya perundingan mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan isu-isu yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut tidak memiliki kekuatan otoritatif dalam membuat keputusan, sehingga pihak yang berkonflik menentukan sendiri penyelesaian yang mereka sepakati. Pada pelaksanaan mediasi, secara sukarela pihak ketiga membantu para pihak-pihak berkonflik untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima terhadap isu-isu yang ada dalam konflik. Pihak ketiga yang melakukan mediasi disebut sebagai mediator.

Mediator dapat dilakukan oleh berbagai aktor, mulai dari tingkatan aktor individu, negara, Non-Government Organization (NGO), hingga tingkatan Organisasi Internasional. Dalam proses mediasi khususnya yang dilakukan oleh suatu organisasi, terdapat hal yang perlu diperhatikan mengenai bagaimana mediator dapat berperan dengan baik dalam menengahi konflik dan mencapai kesepakatan damai maupun meredam konflik. Salah satu caranya dengan melihat bagaimana bentuk strategi yang digunakan oleh mediator dalam menjalankan mediasi.

Dalam upaya penyelesaian konflik Mindanao, Muhammadiyah sebagai aktor organisasi internasional dirasa telah memenuhi persyaratan umum sebagai pihak ketiga yang bernegosiasi. Persyaratan yang dijadikan tolak ukur kesiapan

mediator dibagi ke dalam tiga kriteria utama yang harus dipenuhi, di antaranya adalah kriteria *Acceptability*. Pentingnya persetujuan oleh kedua belah pihak atas keberadaannya sebagai mediator menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Apabila terdapat satu pihak yang tidak setuju dengan perannya sebagai mediator, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar pihak yang berperan sebagai mediator benar-benar merupakan pihak yang netral, tidak memihak pada pihak manapun, dan dapat diterima (*acceptability*) bukan saja secara fisik melainkan pemikirannya untuk membantu para pihak berkonflik menjangkau suatu penyelesaian (Moore 1982, 117).

Kriteria kedua adalah *Impartiality*. Sikap tidak pandang bulu dan memperlakukan semua pihak berkonflik secara sama tanpa membeda-bedakan adalah hal yang wajib dimiliki oleh seorang mediator. Tugas Mediator hanyalah menengahi, mendorong, dan membantu para aktor yang berkonflik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik mereka sendiri (Cook, 1980). Mediator berperan mengendalikan pertemuan dan menjaga aturan main yang disepakati bersama antar kedua pihak yang berkonflik agar perasaan saling percaya dapat tercipta. Saat sikap keterbukaan dapat tercipta, mediator akan lebih mudah mendampingi pihak yang berkonflik menuju proses negosiasi. Imparsialitas mediator terlihat dari kesungguhan upayanya dalam membantu para pihak berkonflik menyelesaikan konflik yang terjadi serta mengontrol dalam pengimplementasian kebijakan apakah telah sesuai dengan perjanjian atau tidak.

Komponen ketiga yang memegang peranan penting adalah sikap *Neutrality*, dimana mediator dituntut untuk tidak memihak pada salah satu pihak yang berkonflik baik dalam sikap maupun perilaku. Mediator dapat dikatakan netral dan mandiri jika mampu membuktikan tidak ada hubungan khusus terhadap satu pihak saja, baik sebelum proses mediasi terjadi, sedang dalam proses mediasi, maupun setelah proses mediasi (Young, 1972). Sikap netral ini dibutuhkan dalam upaya perdamaian konflik untuk mencari dan menawarkan solusi yang objektif dalam proses mediasi sehingga dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang bersifat *win-win solution* bagi masing-masing pihak berkonflik (Rachmawati, 2016).

Selanjutnya pihak yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat utama sebagai mediator dapat memilih pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam upaya menyelesaikan konflik melalui pilihan strategi mediasi yang dijalankan oleh mediator. Karakteristik aktor yang berkonflik serta kriteria konflik yang sedang ditangani dapat mempengaruhi pilihan strategi yang diusung oleh mediator. Semakin tinggi kedudukan mediator, akan semakin fleksibel pula mediator tersebut menjalankan strateginya dari salah satu rangkaian strategi yang lain, dengan dasar strategi mediasi yang dibutuhkan sesuai dengan situasi dan konteks politik (Bervitch, 2009). Berikut adalah beberapa kategori strategi mediasi yang dapat dilakukan oleh mediator dalam upaya penyelesaian konflik:

1. Strategi fasilitasi komunikasi (*Communication Facilitation Strategies*)

Strategi fasilitasi komunikasi merupakan strategi mediasi yang mendeskripsikan perilaku mediator dengan cara menyalurkan informasi kepada para pihak yang berkonflik, memberikan fasilitas negosiasi untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak berkonflik melalui komunikasi dua arah, dan lebih menitikberatkan pada proses mediasi formal yang menjadi cara penyelesaian konflik melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari pihak berkonflik dengan dibantu oleh mediator.

2. Strategi Prosedural (*Prosedural Strategies*)

Mediator dalam menjalankan strategi prosedural dengan cara menggunakan tekanan atau melakukan suatu desakan untuk mengontrol jalannya proses mediasi yang lebih formal yang bertujuan untuk mengikat diri para pihak yang berkonflik dalam upaya perdamaian yang dilakukan. Mediator dapat menentukan aspek-aspek struktural dari sebuah pertemuan maupun perundingan dalam rangka pengendalian terhadap kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berkonflik untuk disatukan dalam mencapai tujuan bersama, melakukan pemberitaan dan distribusi informasi, serta

mengkondisikan kekuatan-kekuatan sumber daya dari pihak yang terlibat dalam konflik melalui komunikasi yang terus berjalan.

3. Strategi Direktif (*Directive Strategies*)

Strategi direktif merupakan strategi yang paling kuat dalam bentuk intervensi dengan cara mengajak para pihak berkonflik untuk bersedia melakukan sesuatu. Mediator akan mempengaruhi isi dan substansi dari proses tawar-menawar saat proses mediasi sedang berlangsung dengan memberikan dorongan atau rangsangan bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan negosiasi dan mengusulkan tuntutan terakhir dengan diberi batas waktu untuk menentukan pilihan dan kebijakan. Hal ini bertujuan untuk merubah cara-cara dari isu-isu atau tingkah laku yang selama ini biasa mereka gunakan untuk menjadi lebih efektif.

Melihat ketiga syarat utama seorang mediator yang dituntut untuk bersifat netral, dapat diterima bersama, berlaku adil dan tidak berpihak pada siapapun, penulis mengambil kesimpulan bahwa Muhammadiyah sebagai aktor organisasi telah memenuhi kriteria sebagai pihak ketiga atau mediator dalam upaya perdamaian konflik.

Berkaitan dengan konflik separatisme masyarakat muslim Mindanao dengan pemerintah Filipina, tahun 2009 merupakan tahun pertama Muhammadiyah terlibat ke dalam upaya perdamaian konflik Mindanao. Keikutsertaan Muhammadiyah ini diawali oleh permintaan

Malaysia, yang telah terlebih dulu menjadi mediator konflik Mindanao, agar Muhammadiyah dapat bergabung ke dalam *International Contact Group* bersama anggota negara dan non-negara lainnya yang memiliki tujuan bersama yaitu perdamaian Mindanao. Muhammadiyah dipercaya menjadi salah satu mediator konflik karena melihat *track-record* Muhammadiyah sebelumnya dalam membantu penyelesaian konflik di Pattani, Thailand. Selain itu keaktifan Muhammadiyah di kancah internasional mampu menempatkan ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin menjadi Wakil Sekretaris Jenderal *World Islamic People's Leadership* (WIPL) yang semakin menegaskan kapabilitas Muhammadiyah dalam membantu perdamaian konflik dunia, khususnya konflik dalam dunia Islam.

Sebagai seorang mediator Muhammadiyah hanya membantu para pihak yang berkonflik dengan cara memberikan bantuan mediasi. Setelah melakukan beberapa kali riset di lapangan, Muhammadiyah meyakini pendekatan terbaik adalah melalui *soft power* atau perundingan secara damai tanpa terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan yang selanjutnya akan diimplementasikan oleh pihak pemerintah Filipina dan MILF. Dari ketiga definisi strategi di atas, Muhammadiyah menggunakan strategi fasilitasi komunikasi yang memberikan fasilitas negosiasi untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak berkonflik melalui dua arah dan menitikberatkan pada proses mediasi formal dibuktikan dengan kesungguhan Muhammadiyah sebagai mediator dalam menyelenggarakan

empat perundingan perdamaian yang dilakukan secara berkala dari tahun 2009 hingga tahun 2012.

2. Konsep *Multi-track Diplomacy (Track two diplomacy)*

Multi-track diplomacy adalah salah satu bentuk diplomasi yang menggabungkan berbagai aktor diplomasi, yang melibatkan aktor resmi negara (*official*) dan diplomat non-negara (*un-official*). Menurut Diamond dan McDonald *multi-track diplomacy* adalah sebagai berikut:

“Diplomasi Multi-track merupakan sebuah kerangka kerja konseptual sebagai suatu sistem kehidupan dan refleksi dari beragam aktivitas yang dilakukan dimana hal tersebut berkontribusi dalam proses perwujudan perdamaian di lingkup internasional”
(**Diamond & McDonald**, 1996)

Multi-track diplomacy disebut juga sebagai sebuah pendekatan sistem untuk perdamaian, dimana pada awal istilah *multi-track diplomacy* diciptakan pada tahun 1989 dalam sebuah buku yang ditulis Dr. Louis Kriesberg berjudul “Timing and Deescalation of International Conflicts”, dimana *track one* adalah bentuk keterlibatan pemerintah dalam proses diplomasi, sementara *track two* diperluas di dalamnya meliputi *track three* (keterlibatan sektor swasta), *track four* (*people to people* seperti program pertukaran pendidikan) dan *track five* (media) (McDonald, 2004). Meskipun di dalam buku tersebut dijelaskan pula sembilan jenis *track* diplomasi lainnya, namun secara garis besar *multi track diplomacy* dikelompokkan ke dalam *track one* (pemerintah) dan *track two* (non-negara). Kedua jenis

diplomasi tersebut meski saling menguatkan namun terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. *Track one diplomacy* adalah diplomasi formal antara negara dan negara atau diplomasi “G to G” (*government to government diplomacy*) yang biasanya dilakukan di meja perundingan dan aktornya adalah para diplomat negara yang resmi dan profesional. Sementara *track two diplomacy* adalah diplomasi tidak resmi yang dilakukan oleh aktor-aktor non pemerintah seperti organisasi, budayawan, pelajar dan lain-lain, yang biasanya dilakukan melalui forum-forum seminar, kunjungan, pertukaran pelajar, dan lain lain yang didasari oleh sikap positif dari kedua belah pihak.

Seperti yang dikatakan oleh John W. McDonald (1992, 118) tentang *track two diplomacy*:

“Citizen, or track two diplomacy, is the nongovernmental, informal, and unofficial action by private citizens in such international issues as conflict resolution and prevention, and environmental policies. Track two diplomacy acts as a supplement to Track one diplomacy, which includes all the governmental, official, and formal activities that occur daily in the international diplomatic area.” (McDonald, 1991).

Lebih lanjut McDonald juga mengemukakan bahwa *track two diplomacy* memiliki dua tujuan yang luas, pertama, untuk mengurangi konflik antara kelompok-kelompok dan bangsa-bangsa dengan meningkatkan komunikasi dan pemahaman, dengan mencoba menurunkan kemarahan, ketegangan, ketakutan, dan kesalah pahaman, serta dengan lebih memanusiakan pihak musuh dan mendorong satu kelompok untuk bisa lebih memahami cara pandang satu kelompok lain (McDonald, 1991).

Kemudian tujuan kedua adalah untuk mengubah cara pandang pihak pertama (pemerintah) dengan harapan para diplomat akan menjadi lebih terbuka pada isu tertentu, dan akhirnya dapat menerima ide pemikiran dari kelompok track dua tentang isu yang digulirkan (McDonald, 1991).

Dalam konteks penelitian ini, Muhammadiyah adalah aktor organisasi seperti yang disebutkan dalam penjelasan *track two diplomacy*, yang tergabung dalam International Contact Group sebagai sebuah *multi-track diplomacy*. Tidak hanya itu peran Muhammadiyah sebagai aktor *track two diplomacy* terlihat dari gagasan Muhammadiyah untuk melakukan *assesment* di tingkat *grass-root* dengan mengirimkan langsung perwakilan Muhammadiyah ke Mindanao serta pemberian beasiswa kepada mahasiswa pasca sarjana Mindanao untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa strategi Muhammadiyah dalam proses perdamaian konflik Mindanao berupa:

1. Muhammadiyah melakukan strategi fasilitasi komunikasi dengan menjadi mediator dalam empat kali diskusi penyelesaian konflik.
2. Kedua, strategi menggunakan *multi-track diplomacy* seperti bergabung ke dalam International Contact Group dan mengirimkan

tim assesment dengan tujuan mengetahui akar permasalahan yang terjadi.

E. Tujuan Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk strategi apakah yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam upaya penyelesaian konflik di Mindanao. Selain itu mengetahui tujuan dan motif Muhammadiyah dalam melaksanakan fungsi mediasi di konflik Mindanao.

F. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memberikan batasan waktu dengan maksud untuk mempermudah analisa yang akan dilakukan sehingga penulisan ini menjadi jelas. Adapun batas waktu yang dipilih adalah dalam kurun waktu tahun 2009 - 2012 yaitu sejak awal dimulainya mediasi Muhammadiyah dalam penyelesaian konflik hingga perundingan terakhir yang dimediasi oleh Muhammadiyah, tanpa mengabaikan kejadian-kejadian di waktu lain yang relevan dan juga data yang menunjang penulisan ini.

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data cara studi pustaka seperti melalui buku-buku perpustakaan, surat kabar dan majalah. Tidak cukup kemungkinan data juga diperoleh melalui data elektronik yang akan diusahakan kevalidannya dengan fakta-fakta yang mendukung. Kemudian data ini diolah dan dianalisa guna membahas permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab akan berisikan tentang hal-hal sebagai berikut:

BAB I akan berisi pendahuluan yang tersusun atas latar belakang masalah, rumusan permasalahan, kerangka konsep, serta metodologi penelitian.

BAB II akan berisi uraian mengenai sejarah dan perkembangan Muhammadiyah hingga proses internasionalisasi Muhammadiyah.

BAB III akan berisi uraian mengenai konflik Mindanao. Dalam bab ini akan dijelaskan sejarah awal munculnya konflik Mindanao yang melibatkan Moro Islamic Liberation Front dengan pemerintah Filipina, dan bentuk-bentuk resolusi konflik apa saja yang telah dilakukan.

BAB IV akan berisi uraian mengenai strategi Muhammadiyah dalam membantu proses perdamaian Konflik Mindanao.

BAB V berisi kesimpulan sekaligus jawaban dari pertanyaan permasalahan.